

**PERANCANGAN *WEBSITE* DAN STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE UNTUK
KENDARAAN LELANG DI DIREKTORAT SARANA
TRANSPORTASI JALAN**

KERTAS KERJA WAJIB



DISUSUN OLEH:

WEGA NAUFALUL YAFIE

2201021

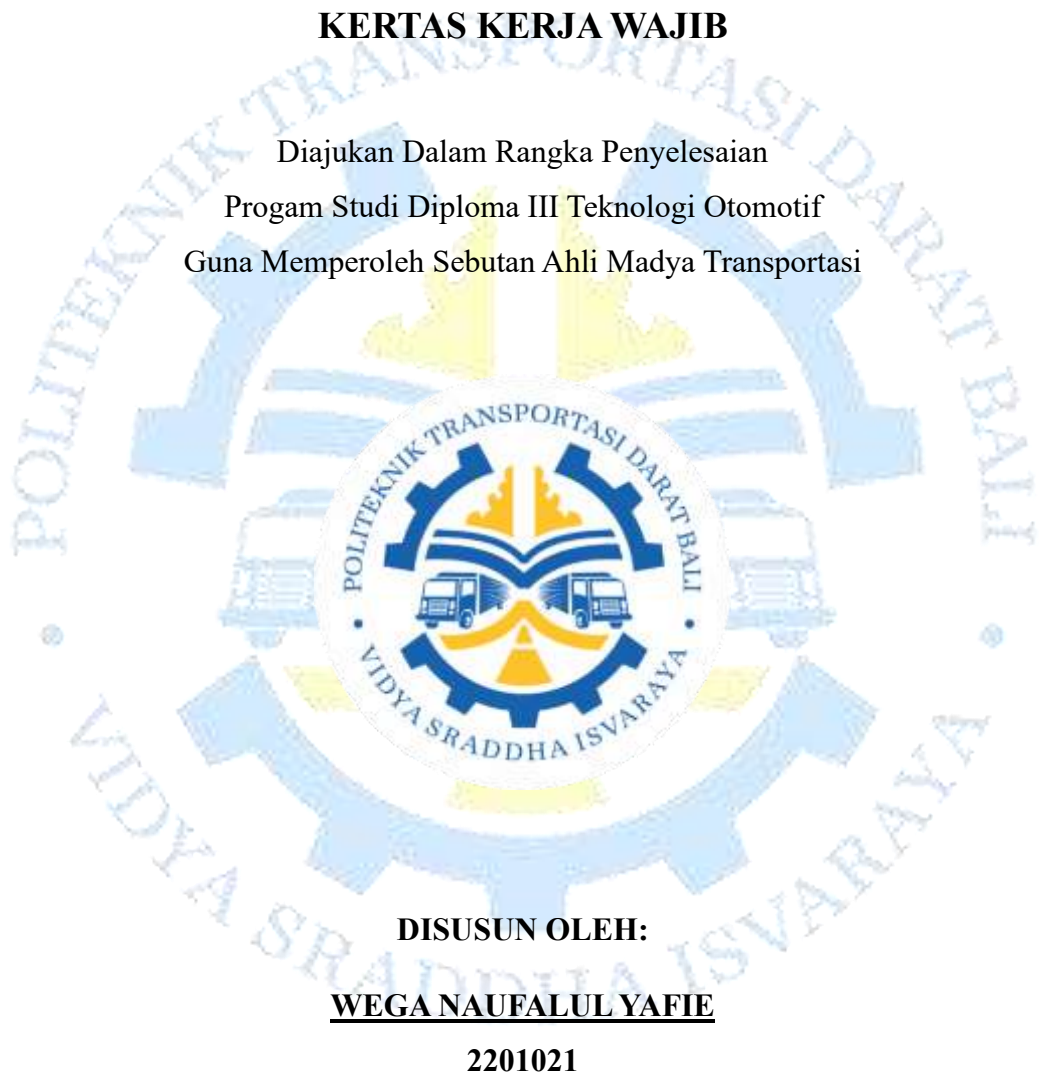
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI**

2025

**PERANCANGAN *WEBSITE* DAN STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE UNTUK
KENDARAAN LELANG DI DIREKTORAT SARANA
TRANSPORTASI JALAN**

KERTAS KERJA WAJIB

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif
Guna Memperoleh Sebutan Ahli Madya Transportasi



DISUSUN OLEH:

WEGA NAUFALUL YAFIE

2201021

PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI

HALAMAN PERSETUJUAN
KERTAS KERJA WAJIB
PERANCANGAN WEBSITE DAN STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE UNTUK
KENDARAAN LELANG DI DIREKTORAT SARANA
TRANSPORTASI JALAN

Disusun Oleh:


WEGA NAUFALUL YAFIE

2201021

Disetujui untuk diajukan pada
Sidang Akhir Kertas Kerja Wajib
Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif


Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING I



Rahmat Ahmad, S.Pd., M.T.
NIP. 198511112019021002

DOSEN PEMBIMBING II



Yusime Fitasari, S.T., M.Si
NIP. 199103142010122001

Ditetapkan di : Tabanan

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG II
DI UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR JAGAKARSA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

disusun oleh:

WEGA NAUFALUL YAFIE


NOTAR. 2201021

Telah diseminarkan di depan Penguji

Pada Tanggal, 4 Juni 2025

Dinyatakan lulus dan memenuhi syarat oleh :


DOSEN PEMBIMBING I,


Arif Devi Dwipayana, S.T., M.M.
NIP. 19851102 201902 1 003

DOSEN PEMBIMBING II,


Surya Aji Ermanto, M.Si.
NIP. 19910207 201902 1 002

DOSEN PENGUJI I,


Rahmat Ahmad, S.Pd., M.T.
NIP. 19851111 201902 1 002

DOSEN PENGUJI II,


I Gusti Bagus Eka Nitivasa, S.T., M.T.
NIP. 197704202009121002

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNOLOGI OTOMOTIF
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
TABANAN
2025**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, Wega Naufalul Yafie, Notar. 2201021, menyatakan bahwa Kertas Kerja Wajib/Tugas Akhir dengan judul **“PERANCANGAN WEBSITE DAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE UNTUK KENDARAAN LELANG DI DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN”** merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam Kertas Kerja Wajib/Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian yang saya susun sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar pustaka. Selain itu, tidak ada bagian dari Kertas Kerja Wajib/Tugas Akhir ini yang telah digunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar Ahli Madya atau kesarjanaan maupun sertifikat Akademik di suatu Perguruan Tinggi.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Darat Bali.

Tabanan, Juni 2025



WEGA NAUFALUL YAFIE
Notar. 2201021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Kertas Kerja Wajib yang berjudul **“PERANCANGAN WEBSITE DAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE UNTUK KENDARAAN LELANG DI DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN”**. Kami menyadari bahwa dalam proses penulisan laporan ini banyak mengalami kendala, untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dengan penuh rasa ikhlas kepada:

1. Ibu Firga Ariani, S.E., M.M.Tr. selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali;
2. Bapak Adrian Pradana, S.T., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif Politeknik Transportasi Darat Bali;
3. Bapak Arif Devi Dwipayana, S.T., M.M. selaku Dosen Pembimbing Magang II;
4. Bapak Surya Aji Ermanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Magang II;
5. Bapak Fatchuri selaku Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa;
6. Bapak Aksan Eka Pramudi selaku Kasubag Tata Usaha Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa;
7. Para Pegawai di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa;
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu ada untuk mendukung;
9. Rekan-rekan Mahasiswa/i Politeknik Transportasi Darat Bali Angkatan III;
10. Rekan-rekan Mahasiswa/i Diploma III Teknologi Otomotif Angkatan III;
11. Adik-adik Mahasiswa/i Politeknik Transportasi Darat Bali Angkatan IV dan V.

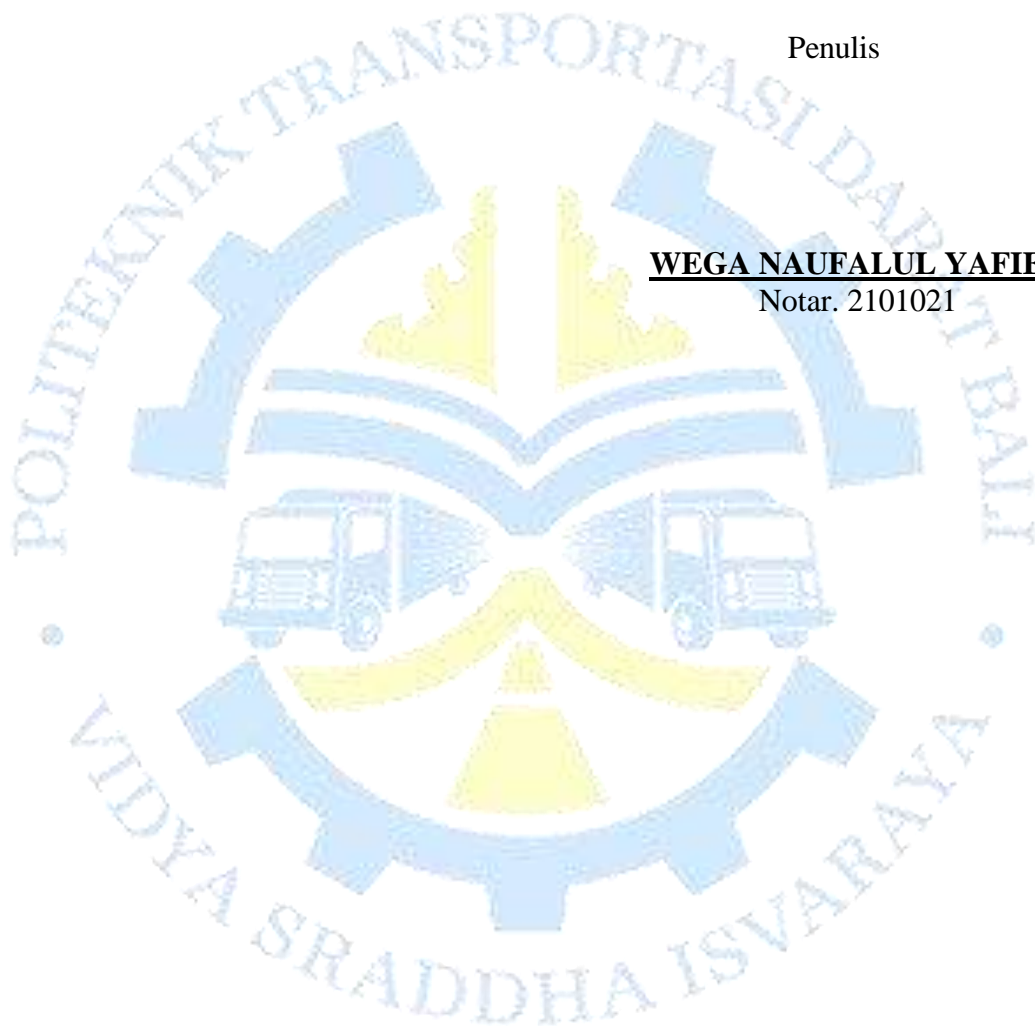
Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Kertas Kerja Wajib yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 23 Mei 2025

Penulis

WEGA NAUFALUL YAFIE

Notar. 2101021



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
2.1 Kondisi Wilayah.....	5
2.2 kondisi objek	6
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	8
3.1 Standar Pelayanan	8
3.2 Pelayanan publik	9
3.3 <i>Website</i>	11

3.4	Pengujian Kendaraan lelang.....	14
3.5	Pembayaran billing.....	16
3.6	SRUT (Sertifikat Regestasi Uji Tipe).....	17
3.7	Kendaraan lelang.....	19
3.8	Penelitian Terdahulu.....	19
BAB IV METODE PENELITIAN		22
4.1	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	22
4.2	Metode Analisis.....	24
4.3	Bagan Alir Penelitian.....	28
4.4	<i>Timeline</i> Kegiatan.....	31
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		32
5.1	Analisis Masalah (<i>Define</i>).....	32
5.2	Perancangan <i>Web-site</i> Penerbitan SRUT Kendaraan Lelang (<i>Design</i>) ..	32
5.3	Pembuatan <i>Website</i> (<i>Develop</i>).....	40
5.4	<i>BlackBox Testing</i>	50
5.5	<i>System Usability Scale</i> (SUS) untuk mengevaluasi kegunaan produk...	54
5.6	Penilaian Standar Pelayanan Penerbitan SRUT Kendaraan Lelang.....	58
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		63
6.1	Kesimpulan.....	63
6.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN.....		67

DAFTAR TABEL

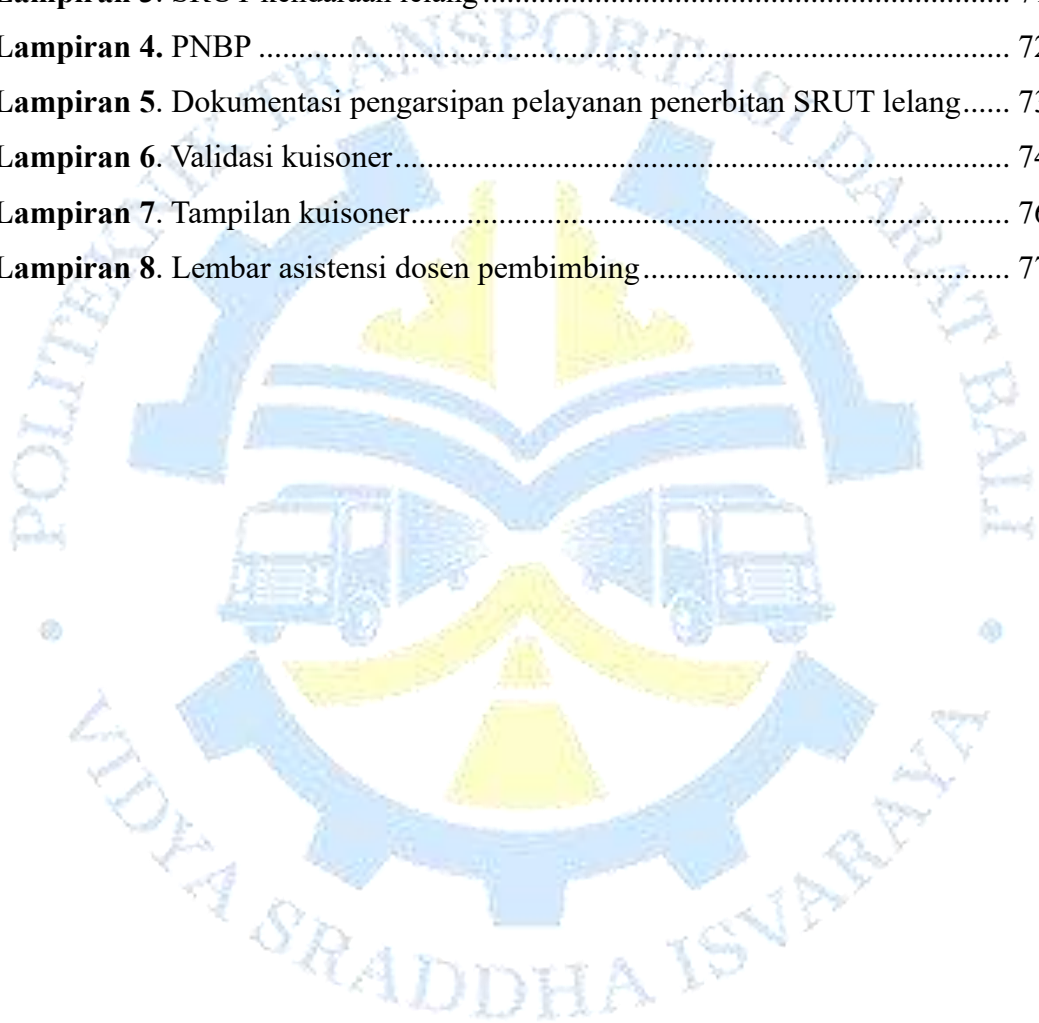
Tabel 2. 1 daftar pegawai.....	6
Tabel 3. 1 Daftar Tarif Penerbitan SRUT	17
Tabel 3. 2 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4. 1 Daftar wawancara	24
Tabel 4. 2 <i>Black Box testing</i>	25
Tabel 4. 3 Nilai SUS.....	26
Tabel 4. 4 Penilaian Kuisoner.....	27
Tabel 4. 5 Kategori Skala Likert.....	28
Tabel 4. 6 <i>Timeline</i> Kegiatan	31
Tabel 5. 1 Actor Use Case	33
Tabel 5. 2 Deskripsi use case.....	35
Tabel 5. 3 BlackBox Testing login	50
Tabel 5. 4 BlackBox Testing Dashboard	50
Tabel 5. 5 BlackBox Testing Validasi.....	51
Tabel 5. 6 BlackBox Testing Upload.....	52
Tabel 5. 7 BlackBox Testing Main menu	52
Tabel 5. 8 BlackBox Testing Pengajuan.....	53
Tabel 5. 9 Penilaian Kuisoner SUS	55
Tabel 5. 10 Standar pelayanan.....	56
Tabel 5. 11 Penilaian Kuisoner Standar Pelayanan	59
Tabel 5. 12 Uji Validitas Kuisoner Standar Pelayanan.....	60
Tabel 5. 13 Uji Reabilitas Kuisoner Standar Pelayanan.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	5
Gambar 2. Surat Pengantar Uji.....	11
Gambar 3. Pengujian Radius Putar.....	15
Gambar 4. Bagan Alir.....	29
Gambar 5. Use Case Diagram.....	34
Gambar 6. activity diagram pertama.....	36
Gambar 7. activity diagram kedua.....	36
Gambar 8. activity diagram ketiga.....	37
Gambar 9. Konsep tampilan untuk pemohon.....	38
Gambar 10. Konsep tampilan untuk admin.....	39
Gambar 11. XAMPP Control Panel.....	41
Gambar 12. Install Composer.....	42
Gambar 13. File Explorer Showing Project Structure.....	43
Gambar 14. Database Schema/ERD.....	44
Gambar 13. Koneksi Database di Code.....	45
Gambar 14. Halaman Beranda Website SRUT.....	45
Gambar 17. Dashboard Admin.....	46
Gambar 18. Code Template Dashboard.....	46
Gambar 19. Halaman Login Admin.....	47
Gambar 20. Code Sistem Login.....	47
Gambar 21. Halaman Status Pengajuan pemohon.....	48
Gambar 22. Panel Admin Management.....	48
Gambar 23. File Upload Interface.....	49
Gambar 24. Email Notification Sampel.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. peyebar luasan <i>website</i>	67
Lampiran 2. peyebar luasan kuisoner.....	69
Lampiran 3. SRUT kendaraan lelang.....	71
Lampiran 4. PNBP	72
Lampiran 5. Dokumentasi pengarsipan pelayanan penerbitan SRUT lelang.....	73
Lampiran 6. Validasi kuisoner.....	74
Lampiran 7. Tampilan kuisoner.....	76
Lampiran 8. Lembar asistensi dosen pembimbing.....	77



INTISARI

PERANCANGAN *WEBSITE* DAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE UNTUK KENDARAAN LELANG DI DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

Oleh

Wega Naufalul Yafie
2201021

Pelayanan publik yang efisien dan transparan adalah esensial, terutama dalam penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan lelang di Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Proses manual saat ini menimbulkan inefisiensi dan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengevaluasi website serta standar pelayanan SRUT kendaraan lelang guna mendukung *e-government* dan meningkatkan kualitas layanan.

Metode yang digunakan Metode yang digunakan adalah *Research and Development (R&D)* dengan pendekatan model *4D (Define, Design, Develop, Disseminate)*, meliputi perancangan website *UML (Unified Modeling Language)* dengan beberapa tipe yaitu *Use case* dan *Activity Diagram*. Pengujian fungsionalitas dilakukan melalui *Black Box Testing*. Evaluasi kegunaan sistem diukur dengan *System Usability Scale (SUS)* dan penilaian standar pelayanan berdasarkan Keputusan Direktur Sarana Transportasi Jalan Nomor: SK.70/AJ.202/DSTJ/XI/2023. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner kepada staf dan pemohon SRUT kendaraan lelang periode Januari.

Hasil menunjukkan website berhasil memfasilitasi pengajuan SRUT secara digital, mulai dari unggah berkas hingga notifikasi. *Black Box Testing* mengonfirmasi fungsionalitas berjalan baik. Evaluasi *SUS* menunjukkan hasil 79,16 dengan kategori Grade B (74 - 80.3) dan kuesioner standar pelayanan menunjukkan nilai 79,27 dengan kategori puas. *Website* ini diharapkan mempercepat proses administrasi dan mempermudah akses layanan, menjadi model digitalisasi layanan publik yang efektif.

Kata Kunci: *Website*, Standar Pelayanan, SRUT, Kendaraan Lelang, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

WEBSITE DESIGN AND SERVICE STANDARDS FOR THE PUBLICATION OF TYPE TEST REGISTRATION CERTIFICATES FOR AUCTION VEHICLES AT THE DIRECTORATE OF ROAD TRANSPORTATION FACILITIES

By

Wega Naufalul Yafie
2201021

Efficient and transparent public services are essential, especially in the issuance of Type Testing Registration Certificates (SRUT) for auction vehicles at the Directorate of Road Transportation Facilities. The current manual process leads to inefficiency and uncertainty. This research aims to design and evaluate a website and service standards for SRUT auction vehicles to support e-government and improve service quality.

The method used is Research and Development (R&D) with a 4D model approach (Define, Design, Develop, Disseminate), which includes the design of a UML (Unified Modeling Language) website with several types namely Use Case and Activity Diagram. Functional testing is conducted through Black Box Testing. System usability evaluation is measured using the System Usability Scale (SUS) and service standard assessment based on the Director's Decision on Road Transport Facilities Number: SK.70/AJ.202/DSTJ/XI/2023. Data is collected through observation, interviews, and questionnaires from staff and applicants of the auction vehicle SRUT for the January period.

The results show that the website successfully facilitates the submission of SRUT digitally, from document upload to notifications. Black Box Testing confirms that the functionality is performing well. The SUS evaluation shows a score of 79.16 with a Grade B category (74 - 80.3), and the standard service questionnaire shows a score of 79.27 with a satisfactory category. This website is expected to expedite the administrative process and ease access to services, serving as an effective model for the digitalization of public services.

Keywords: Website, Service Standards, SRUT, Auction Vehicles, Public Services.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan yang berperan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil, transparan, dan berkualitas sesuai prinsip good governance. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau layanan administratif sesuai dengan ketentuan hukum.

Direktorat Sarana Transportasi Darat sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan memiliki peran penting dalam pelayanan transportasi, termasuk penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). SRUT merupakan dokumen legalitas penting bagi kendaraan, khususnya kendaraan lelang yang memiliki karakteristik administratif berbeda. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi menjadi solusi yang dapat dilakukan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan perlunya percepatan implementasi *e-government* guna menciptakan sistem layanan yang efisien dan terintegrasi. Digitalisasi layanan dapat mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan memudahkan akses informasi oleh masyarakat (Hikmah S. & Fransisca Tonapa, 2024). Penerapan *e-government* tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui digitalisasi, berbagai layanan dapat diakses secara daring (*online*), sehingga mengurangi ketergantungan pada proses tatap muka yang cenderung lambat dan rentan terhadap praktik-praktik nonprosedural. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, minim kesalahan, serta terdokumentasi dengan baik.

Setelah membuat *website*, setiap instansi pemerintahan wajib mengeluarkan standar pelayanan sebagai bentuk komitmen untuk menjamin kejelasan, keterbukaan, dan kepastian dalam proses pelayanan publik. Namun, hingga saat ini belum tersedia Standar Pelayanan yang secara khusus mengatur proses penerbitan SRUT untuk kendaraan lelang, sehingga terjadi perbedaan prosedur antar petugas yang berdampak pada ketidakefisienan dan kurangnya transparansi. Padahal, sesuai dengan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Standar ini menjadi acuan dalam menjamin kejelasan prosedur, waktu, dan biaya (KemenPAN-RB, 2014). Ketidakteraturan dalam pelayanan ini juga menunjukkan belum optimalnya penerapan standar sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Sarana Transportasi Jalan Nomor SK.70/AJ.202/DSTJ/XI/2023. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul **“PERANCANGAN WEBSITE DAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE UNTUK KENDARAAN LELANG DI DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN”**. Melalui penyusunan KKW ini, diharapkan dapat memberikan kontribusinya nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi darat, khususnya dalam hal penerbitan SRUT untuk kendaraan lelang.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang telah ditetapkan antara lain yaitu:

1. Bagaimana perancangan *website* pelayanan penerbitan SRUT kendaraan lelang di direktorat sarana transportasi darat agar Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi?
2. Bagaimana hasil uji validitas coba rancang bangun *Website* pelayanan penerbitan SRUT kendaraan lelang di direktorat sarana transportasi darat?
3. Bagaimana penilaian *website* dan standar pelayanan penerbitan SRUT kendaraan lelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Membuat rancangan *website* pelayanan penerbitan SRUT kendaraan lelang.
2. Mengetahui hasil uji validitas *website* pelayanan penerbitan SRUT kendaraan lelang.
3. Mengetahui hasil penilaian *website* dan standar pelayanan penerbitan SRUT kendaraan lelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi dan pelayanan publik, khususnya dalam digitalisasi proses administrasi penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan lelang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Sarana Transportasi Darat dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan melalui penerapan *website* berbasis standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga dapat mempermudah masyarakat atau pemohon dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor, menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, serta memberikan gambaran teknis bagi pengembang sistem dalam membangun layanan digital yang sesuai kebutuhan.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas ke bidang lain yang tidak menjadi cakupan penelitian, maka diperlukan adanya batasan masalah. Batasan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu :

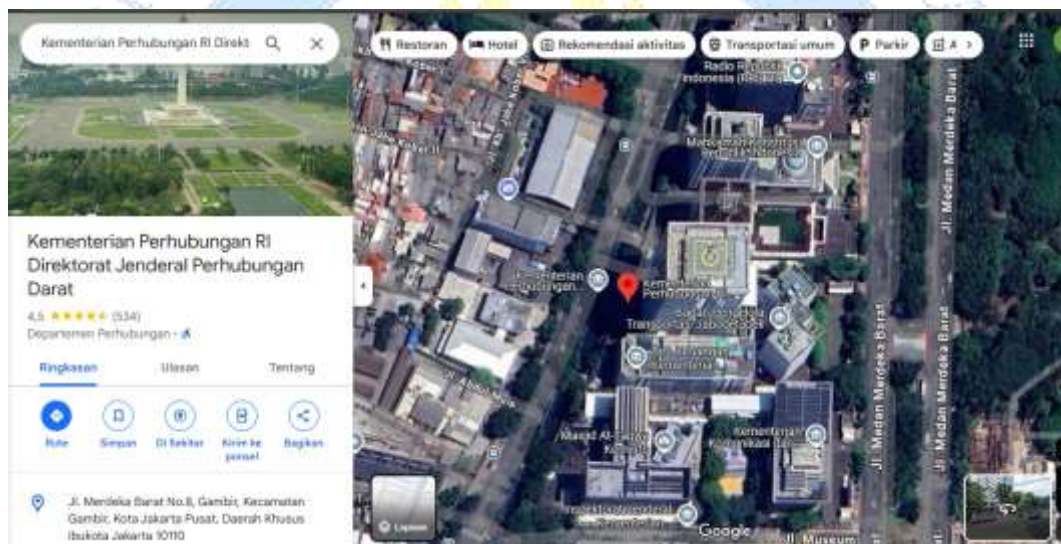
1. Identifikasi langkah-langkah pembuatan *Web-site* yang diperlukan dalam proses penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan lelang di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
2. Penyusunan Standar pelayan penerbitan SRUT berdasarkan potensi kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses pengajuan, sekaligus mengacu pada keputusan direktur sarana transportasi jalan nomor : SK.70/AJ.202/DSTJ/XI/2023 serta berkordinasi dengan staf bersangkutan.
3. *Website* ini digunakan untuk mempermudah pelayanan seperti mengumpulkan berkas-berkas dan memverifikasi serta penerbitan Surat Pengantar Uji (SPU).
4. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pegawai direktorat sarana yang menangani terkait pelayanan penerbitan SRUT kendaraan lelang dan pemohon yang melakukan permohonan bulan januari.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Wilayah

Direktorat Sarana Transportasi Jalan, yang juga dikenal sebagai Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, merupakan salah satu unit kerja di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat). Direktorat ini berkedudukan di Jl. Merdeka Barat No. 8, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Lokasi kantor tersebut dapat dilihat pada peta berikut:



(sumber : google maps)

Gambar 1. Lokasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Direktorat Sarana Transportasi Jalan memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana transportasi jalan, yang meliputi jalan, jembatan, terminal, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, direktorat ini juga berperan penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan transportasi jalan, termasuk pengelolaan lalu lintas, penimbangan kendaraan bermotor, serta perumusan kebijakan di bidang keselamatan transportasi jalan.

2.2 kondisi objek

Subdirektorat Uji Tipe pada Direktorat Sarana Transportasi Darat memiliki peran penting dalam pelayanan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) bagi kendaraan hasil lelang, yang merupakan dokumen legal penunjang registrasi kendaraan di kepolisian. Sebagian besar permohonan SRUT yang diterima berasal dari kendaraan hasil lelang yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan seperti BPKB atau STNK, sehingga SRUT menjadi salah satu dokumen kunci untuk proses registrasi ulang di kepolisian. Dengan kondisi tersebut, petugas harus bekerja lebih teliti untuk memastikan bahwa seluruh data kendaraan sesuai dan valid agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen. Oleh karena itu, efektivitas kerja dan ketelitian petugas sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan SRUT kendaraan lelang ini. Petugas yang melayani pelayanan penerbitan SRUT kendaraan lelang berjumlah 6 orang dari Subdirektorat Uji Tipe pada bagian sertifikasi berikut :

Tabel 2. 1 daftar pegawai

No	Nama	Jabatan
1.	Agung Putra Pratama	Staf Uji Tipe
2.	Rizky Widiyanto	Staf Uji Tipe
3.	Ni Komang Meta Jayanti.P	Staf Uji Tipe
4.	I Made Hary	Staf Uji Tipe
5.	M Hafiz Bashari	Staf Uji Tipe
6.	Ahmad Kiko Bangsawan	Staf Uji Tipe

Pada saat ini proses penerbitan SRUT kendaraan lelang masih manual dengan datang langsung dan menghubungi lewat *whatsapp* secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Berkas Secara Manual

Pemohon datang ke Direktorat Sarana Transportasi Darat dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti:

- a. Risalah lelang
- b. Surat permohonan
- c. Form A

- d. Nomor rangka kendaraan
 - e. Foto kendaraan
2. Pemeriksaan dan Validasi Dokumen

Petugas memeriksa kelengkapan dan kecocokan data dalam berkas dengan foto kendaraan yang dilampirkan.
 3. Penerbitan Surat Pengantar Uji (SPU)

Jika semua dokumen lengkap dan sesuai, staf akan membuat SPU dan mengirimkannya ke pemohon melalui *WhatsApp*.
 4. Pengujian Kendaraan di KIR

Pemohon membawa kendaraan lelang ke tempat pengujian kendaraan bermotor (KIR). Jika kendaraan lulus uji, bukti kelulusan akan dikirim kembali ke staf melalui *WhatsApp*.
 5. Pembuatan SRUT

Setelah menerima bukti lulus uji, staf memproses pembuatan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) kendaraan lelang.
 6. Pengesahan oleh Direktur Jenderal

SRUT yang sudah jadi diserahkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk disahkan.
 7. Pembayaran PNBP

Sebelum SRUT dikirim ke pemohon, staf akan mengirimkan kode billing untuk pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Pemohon harus membayar dan mengirim bukti pembayarannya ke staf.
 8. Pengiriman SRUT ke Pemohon

Setelah pembayaran diverifikasi, SRUT akan dikirim ke alamat pemilik kendaraan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Standar Pelayanan

Standar Standar pelayanan adalah tolok ukur yang ditetapkan secara resmi dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang berfungsi sebagai acuan wajib bagi penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan. Selain itu, standar ini juga menjadi panduan bagi masyarakat atau pemohon dalam mengajukan permohonan, serta berperan sebagai instrumen pengawasan oleh masyarakat dan/atau penerima layanan terhadap kinerja penyelenggara pelayanan (Herwanis, Irham and Handrianto, 2021). Terdapat komponen pada standar pelayanan publik meliputi: 1) prosedur pelayanan, 2) waktu penyelesaian, 3) biaya pelayanan, 4) produk pelayanan, 5) sarana dan prasarana, dan 6) kompetensi petugas pemberi pelayanan. Selain itu, terdapat faktor yang menjadi pendukung dalam mewujudkan pelayanan prima, yakni kesadaran, aturan, organisasi-organisasi publik, pendapatan dan kesejahteraan, kemampuan dan ketrampilan pegawai serta sarana dan prasarana yang memadai. Namun faktor tersebut dapat juga menjadi penghambat jika hal tersebut dijadikan resisten dalam pelayanan (Rohman dan Larasati, 2020).

Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan hasil lelang yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan suatu proses administratif yang kompleks dan memerlukan penanganan secara cermat serta terstruktur. Proses ini terdiri dari sejumlah tahapan penting yang saling berkaitan, antara lain: verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, pemeriksaan teknis kendaraan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi dan persyaratan teknis, pembayaran biaya layanan atau billing, hingga tahapan validasi akhir sebelum SRUT diterbitkan secara resmi kepada pemohon. Karena sifatnya yang melibatkan banyak proses dan unit kerja, penerbitan SRUT sangat berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, duplikasi pekerjaan, bahkan kesalahan administratif, terutama jika tidak dilandasi oleh standar pelayanan yang jelas dan terstruktur. Tanpa adanya pedoman yang baku, proses pelayanan cenderung

berjalan tidak seragam, lambat, dan kurang transparan, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Untuk menghindari hal tersebut, Direktorat Sarana Transportasi Jalan secara konsisten berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.70/AJ.202/DSTJ/XI/2023 tentang Standar Pelayanan Publik pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Dokumen ini menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan, termasuk proses penerbitan SRUT, yang mencakup penetapan standar prosedur, waktu penyelesaian, biaya layanan, kompetensi petugas, dan kelengkapan sarana prasarana.

Dengan adanya standar pelayanan, setiap tahapan dalam proses penerbitan SRUT dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemohon layanan. Standar ini juga menjadi instrumen evaluatif dalam menilai kinerja penyelenggara layanan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam jangka panjang, penerapan standar pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan publik di sektor transportasi darat secara berkelanjutan.

3.2 Pelayanan publik

Proses alur penerbitan SRUT kendaraan lelang tidak jauh dari pelayanan publik direktorat sarana transportasi jalan. Pelayanan publik merupakan suatu konsep dalam administrasi publik yang mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan transparan (Maryam, 2016). “Menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Setiap instansi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga ke level paling bawah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat

atau warga negara. Bentuk pelayanan ini dikenal sebagai pelayanan publik. Pemerintah berkewajiban menjamin bahwa seluruh kepentingan warga negara terpenuhi secara baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sinambela, pelayanan publik merupakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah kepada sekelompok orang yang kegiatannya memberikan manfaat dalam suatu komunitas atau kesatuan tertentu, serta memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak selalu berupa produk fisik. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik ditujukan oleh pemerintah kepada individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Siburian, Lukman and Kurniawati, 2020). Dalam konteks ini Direktorat bertugas memastikan kendaraan lelang legal dengan memverifikasi berkas-berkas seperti risalah lelang, surat permohonan, Form A, nomer rangka, foto kendaraan, Serta mengeluarkan Surat Pengantar Uji (SPU). Kemudian pemilik kendaraan dianjurkan menguji kendaraannya di pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan SPU yang didapatkan. Setelah diuji apabila lulus pemohon untuk dianjurkan mengirimkan hasil uji kepada pihak Direktorat sarana transportasi darat sebagai patokan penerbitan SRUT kendaraan lelang namun sebelum diterbitkan pemohon diwajibkan membayar biaya pembuatan melalui kode *billing* yang sudah dikirim oleh staf.



(Sumber : Staf Pegawai Direktorat Sarana Transportasi Darat)

Gambar 2. Surat Pengantar Uji

Peningkatan mutu pelayanan publik menjadi salah satu isu yang sangat krusial. Di satu sisi, masyarakat semakin menuntut layanan yang lebih baik, namun di sisi lain, praktik penyelenggaraan layanan masih stagnan dan belum menunjukkan perubahan signifikan. Masyarakat menginginkan pelayanan yang efisien dan berkualitas, namun kenyataannya, proses pelayanan publik masih sering dianggap rumit, lambat, mahal, dan melelahkan, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

3.3 Website

Revolusi Industri 4.0 menandai era modernisasi yang ditandai dengan fokus pada ekonomi digital, teknologi robotik, *big data*, kecerdasan buatan, serta berbagai bentuk digitalisasi lainnya. Pada era ini, aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual bertransformasi menjadi proses digital untuk mempermudah pekerjaan sekaligus meningkatkan efisiensi waktu. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengadopsi perubahan ini, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, khususnya dalam hal pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan yang

diberikan pemerintah kepada warga negara adalah layanan publik di bidang administrasi yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran langsung dan dekat dengan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi tersebut (Hasri dan Sudarmilah, 2021).

Dalam konteks pelayanan publik, kecepatan, ketepatan, dan kemudahan akses menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh instansi pemerintah, terlebih di era Revolusi Industri 4.0. Pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk transformasi pelayanan tersebut adalah dengan menghadirkan sistem berbasis *website* yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. *Website* Pelayanan publik kini menjadi salah satu platform digital yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi serta memberikan layanan administrasi kepada masyarakat secara cepat dan *real-time*. Oleh karena itu, saya berencana membuat sebuah website guna mempermudah dan mempercepat proses penerbitan SRUT kendaraan lelang di Direktorat Transportasi Darat. Pembuatan *website* ini akan melibatkan beberapa unsur utama, yaitu:

1. *Domain*

Nama domain atau URL merupakan alamat khusus di internet yang berfungsi untuk mengenali sebuah situs web. Dengan kata lain, domain adalah alamat yang digunakan untuk mengakses atau menemukan sebuah *website*.

2. *Web hosting*

Web hosting merupakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai data, gambar, file, dan lain-lain yang akan ditampilkan di *website*. Data yang dapat disimpan dan ditampilkan di situs web akan semakin banyak seiring dengan meningkatnya ukuran *web hosting* yang disewa.

3. Bahasa pemrograman

Merupakan bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan perintah di *website* saat diakses. Pemilihan bahasa pemrograman sangat mempengaruhi sifat *website*, apakah akan bersifat statis atau dinamis. Dalam pengembangan *website*, bahasa

pemrograman yang umumnya digunakan meliputi *HyperText Markup Language* (HTML), *Cascading Style Sheets* (CSS), *Hypertext Preprocessor* (PHP), dan banyak bahasa pemrograman lainnya.

Teknologi yang digunakan untuk pembuatan *website*:

1. *Backend*: PHP 7.4+

yaitu bahasa pemrograman sisi server untuk membuat *website* dan aplikasi *web*. Versi ini menawarkan fitur baru dan peningkatan performa, membuat pengembangan *web* lebih cepat, aman, dan efisien.

2. *Database*: MySQL 5.7+

Yaitu sistem manajemen basis data relasional yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data secara efektif. Versi ini menghadirkan peningkatan dalam hal kinerja, keamanan, serta kemudahan pengelolaan data, sehingga mampu mendukung aplikasi *web* dan sistem informasi dengan lebih handal dan responsif.

3. *Frontend*: HTML5, CSS3, *JavaScript*

HTML5, CSS3, dan *JavaScript* adalah teknologi utama untuk membuat halaman *web* modern. *HTML5* digunakan untuk menyusun struktur dan konten halaman, termasuk dukungan multimedia tanpa perlu *plugin* tambahan. CSS3 mengatur tampilan dan desain halaman agar lebih menarik dan responsif di berbagai perangkat. Sementara itu, *JavaScript* menambahkan interaktivitas dan dinamika pada halaman *web*, seperti animasi, validasi data, dan pengambilan informasi secara *real-time*, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik.

4. *Framework CSS*: *Bootstrap 5*

Bootstrap 5 adalah *framework* CSS modern yang digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan tampilan *website* yang responsif dan menarik. Dengan menyediakan kumpulan komponen siap pakai seperti tombol, form, navigasi, dan *grid sistem*, *Bootstrap 5* membantu pengembang mendesain halaman yang konsisten di berbagai perangkat tanpa harus menulis banyak kode CSS dari nol.

5. *Library JavaScript*: *jQuery*, *DataTables*, *Chart.js*, *SweetAlert2*

jQuery, *DataTables*, *Chart.js*, dan *SweetAlert2* adalah library JavaScript yang membantu pengembang membuat aplikasi web lebih interaktif dan mudah digunakan. *jQuery* memudahkan manipulasi elemen dan pengelolaan event dengan kode yang sederhana. *DataTables* mempercantik dan mempermudah pengelolaan tabel data dengan fitur seperti pencarian dan pengurutan otomatis. *Chart.js* digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data yang menarik, sementara *SweetAlert2* menampilkan popup notifikasi dan konfirmasi yang cantik dan interaktif, menggantikan alert standar browser. Semua library ini mempercepat pengembangan dan meningkatkan pengalaman pengguna pada aplikasi web.

6. Library PHP: PHPMailer

PHPMailer adalah library PHP yang digunakan untuk mengirim email dari aplikasi web dengan lebih mudah dan aman dibandingkan fungsi mail() bawaan PHP. *PHPMailer* mendukung berbagai fitur seperti pengiriman melalui SMTP, autentikasi email, lampiran file, dan format HTML. Dengan library ini, pengembang dapat mengirim email notifikasi, konfirmasi, atau laporan dari sistem secara profesional dan andal.

7. Aplikasi Server: Apache/Nginx

Apache dan *Nginx* adalah aplikasi server web yang berfungsi untuk melayani permintaan dari browser dan mengirimkan halaman web ke pengguna. Keduanya digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis PHP dan mengelola lalu lintas data antara server dan klien.

3.4 Pengujian Kendaraan lelang

Dalam konteks transportasi, kendaraan hasil lelang harus melalui serangkaian proses pengujian sebelum dapat digunakan secara legal di jalan raya. Salah satu persyaratan penting dalam legalitas kendaraan adalah penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) bagi kendaraan yang memerlukannya. SRUT berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2021 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Proses ini bertujuan

untuk memastikan bahwa kendaraan lelang tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga aspek keselamatan dan keamanan dalam penggunaannya.

Pengujian ini dilakukan setelah diterbitkannya Surat Pengantar Uji (SPU) oleh Direktorat Sarana Transportasi Darat. Didalam SPU ini terdapat pengujian mana yang akan menguji kendaraan lelang, biasanya pengujian terdekat dengan domisili pemohon. Dalam pengujian kendaraan lelang, sama seperti pengujian laik jalan yang dilakukan di pengujian kendaraan bermotor namun ada salah satu aspek tambahan yang diuji adalah radius putar kendaraan. Hasil pengujian ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kelayakan kendaraan di jalan raya dan penentuan terbitnya SRUT kendaraan lelang. Direktorat Sarana Transportasi Darat memiliki peran penting dalam mengawasi serta memproses registrasi dan pengujian kendaraan hasil lelang agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kendaraan hasil lelang yang berasal dari berbagai instansi, termasuk kendaraan dinas atau kendaraan yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan komersial, harus melalui proses verifikasi sebelum dapat didaftarkan ulang. Faktor-faktor seperti kondisi kendaraan, riwayat penggunaan, serta kelengkapan dokumen menjadi aspek utama dalam proses ini.



Gambar 3. Pengujian Radius Putar

Tidak semua unit pengujian kendaraan bermotor memiliki kewenangan maupun fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pengujian terhadap kendaraan hasil lelang. Tempat magang saya merupakan salah satu unit yang telah memenuhi persyaratan tersebut dan mampu melakukan pengujian kendaraan lelang secara

legal dan terstandarisasi. Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan pemilik kendaraan, diketahui bahwa masih banyak pemilik kendaraan hasil lelang yang merasa bingung mengenai proses penerbitan SRUT. Oleh karena itu saya membuat web site agar pemohon tidak kebingungan saat melakukan penerbitan SRUT.

3.5 Pembayaran billing

Istilah *billing* berasal dari kata bahasa Inggris "*bill*" yang berarti bukti pembayaran. Dengan demikian, *billing* dapat diartikan sebagai proses mengirimkan atau menyampaikan bukti transaksi pembayaran (Wang, 2023). Pembayaran *billing* di pemerintahan adalah sistem pembayaran yang menggunakan kode *billing* sebagai identifikasi tagihan yang harus dibayar oleh masyarakat atau badan usaha kepada instansi pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses penerimaan negara. Dalam hal ini SRUT kendaraan lelang tidak akan terbit jika pembayaran tidak dilakukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 menetapkan regulasi mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Regulasi ini diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pemungutan biaya atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada masyarakat dan pelaku usaha. PP ini mencakup berbagai jenis layanan di bidang perhubungan, termasuk layanan di sektor perkeretaapian, penerbangan, pelayaran, serta transportasi darat, salah satunya adalah pelayanan uji tipe dan penerbitan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan bermotor. Dalam konteks kendaraan lelang, SRUT menjadi dokumen penting yang diperlukan agar kendaraan tersebut bisa didaftarkan ulang atas nama pemilik baru dan dioperasikan secara legal di jalan raya. Kendaraan hasil lelang, terutama yang berasal dari instansi pemerintah, barang sitaan, atau kendaraan *ex-import*, sering kali tidak memiliki SRUT aktif atau perlu dilakukan proses ulang verifikasi data teknisnya. Tarif biaya penerbitan SRUT kendaraan lelang sama dengan penerbitan SRUT kendaraan biasa bisa dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Daftar Tarif Penerbitan SRUT

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
1	Mobil bus, dan mobil barang, Kendaraan khusus, kereta tempelan, dan kereta gandengan	Per sertifikat	Rp. 250.000,00
2	Mobil Penumpang	Per sertifikat	Rp. 500.000,00
3	Sepeda Motor	Per sertifikat	Rp. 100.000,00

(Sumber :Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016)

3.6 SRUT (Sertifikat Regestasi Uji Tipe)

Layaknya bayi yang baru lahir perlu didaftarkan ke negara untuk memperoleh akta kelahiran, kendaraan yang baru tiba di Indonesia atau baru selesai diproduksi juga harus didaftarkan agar memiliki identitas resmi. Untuk bayi, pendaftaran dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk kendaraan, proses ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Identitas resmi kendaraan tersebut dikenal dengan nama Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), yang menjadi dokumen pengenalan sebelum kendaraan mendapatkan BPKB, STNK, atau pelat nomor. SRUT merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Direktorat Sarana Transportasi Darat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kendaraan yang akan digunakan di jalan raya, termasuk kendaraan hasil lelang, telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, penerbitan SRUT bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kendaraan sebelum dioperasikan di jalan raya. Kendaraan hasil lelang yang berasal dari berbagai instansi atau perusahaan yang tidak mempunyai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) harus melalui proses pengujian dan registrasi ulang agar mendapatkan SRUT sebelum dapat digunakan kembali. Hal ini merupakan bagian dari pelayanan umum di sektor transportasi darat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi dan keselamatan transportasi. Kendaraan tanpa

dokumen resmi, seperti STNK dan BPKB, merupakan kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidakteraturan dalam administrasi kendaraan ini dapat menimbulkan berbagai risiko hukum, termasuk penyitaan kendaraan, denda, atau bahkan tuduhan kepemilikan kendaraan ilegal. Oleh karena itu, sebelum kendaraan tersebut dapat digunakan secara legal di jalan raya, pemilik wajib melakukan pengurusan dokumen resmi sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Salah satu langkah awal dalam proses legalisasi kendaraan tanpa surat-surat adalah penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). SRUT merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. SRUT menjadi dasar bagi proses administrasi lebih lanjut, termasuk pengajuan penerbitan STNK dan BPKB oleh pihak yang berwenang.

Direktorat Sarana Transportasi Darat dan instansi terkait memiliki peran penting dalam mengawasi serta memproses registrasi kendaraan yang belum memiliki dokumen kepemilikan resmi. Kendaraan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk kendaraan bekas pakai, kendaraan hasil lelang tanpa kelengkapan dokumen, atau kendaraan yang belum terdaftar sebelumnya, harus melalui proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Faktor-faktor seperti spesifikasi kendaraan, riwayat kepemilikan, serta potensi keterkaitan dengan kasus hukum perlu diperiksa sebelum SRUT dapat diterbitkan.

Pelayanan administrasi dalam proses legalisasi kendaraan tanpa dokumen harus dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan baru. Implementasi sistem berbasis teknologi dapat membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penerbitan dokumen kendaraan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme yang terstruktur, proses legalisasi kendaraan dapat mendukung ketertiban administrasi kendaraan bermotor serta meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas secara keseluruhan.

3.7 Kendaraan lelang

Kendaraan lelang merupakan kendaraan yang dijual melalui mekanisme pelelangan oleh instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun lembaga keuangan. Pelelangan kendaraan dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan aset yang sudah tidak digunakan, mengalihkan kepemilikan kendaraan secara legal, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kendaraan dengan harga yang lebih kompetitif.

Dalam konteks transportasi, kendaraan lelang yang telah berpindah kepemilikan memerlukan serangkaian proses administrasi sebelum dapat digunakan di jalan raya. Salah satu persyaratan penting dalam legalitas kendaraan adalah penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) bagi kendaraan lelang yang tidak mempunyai STNK dan BPKB. Direktorat Sarana Transportasi Darat memiliki peran penting dalam mengawasi serta memproses registrasi kendaraan hasil lelang agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kendaraan hasil lelang yang berasal dari berbagai instansi, termasuk kendaraan dinas atau kendaraan yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan komersial, harus melalui proses verifikasi sebelum dapat didaftarkan ulang. Faktor-faktor seperti kondisi kendaraan, riwayat penggunaan, serta kelengkapan dokumen menjadi aspek utama dalam proses ini.

3.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan penelitian saat ini sehingga dapat memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang perlu dikembangkan (Budiman and Riyanto, 2013). Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi serta pertimbangan dalam melaksanakan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
1	Al Hasri & Sudarmilah, (2021)	“SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS WEBSITE KELURAHAN BANARAN”	“Sistem Informasi Pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan blackbox secara keseluruhan fitur bekerja sesuai dan berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan selama dilakukan pengujian tidak terdapat error yang ditemukan. Sistem dapat membantu dalam pelayanan administrasi dengan cara mengirimkan kembali berupa file surat ke alamat email secara langsung kepada pelapor. Berdasarkan pengujian SUS didapatkan nilai rata-rata 74.9 yang dapat disimpulkan sistem yang dibangun termasuk kedalam kategori baik yang dapat memberikan kemudahan atas kendala dalam pelayanan administrasi secara konvensional atau datang langsung ke kantor kelurahan”.	Penelitian ini membahas mengenai sistem informasi pelayanan berbasis website dengan lingkup kelurahan
2	Neneng Siti Maryam (2016)	“MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> MELALUI PELAYANAN PUBLIK”	“Terdapat lima cara perbaikan di sektor pelayanan publik yang layak dipertimbangkan, yaitu: mempercepat pembentukan UU pelayanan publik, membangun sistem pelayanan publik satu atap (one stop service), memastikan transparansi biaya pengurusan pelayanan publik, menyusun SOP, dan mereformasi pegawai yang terlibat dalam pelayanan public”	Penelitian ini berfokus pada pengembangan pelayanan publik seluruh Indonesia sedangkan penelitian saya berfokus terhadap pengembangan

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
				pelayanan di direktorat transportasi darat
3	Santy Nurina Aprilia (2014)	“Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)”	“Website Pemerintah Kabupaten Jombang telah efektif sebagai media penyampaian informasi, namun sebagai media layanan elektronik (e-service) belum efektif, dengan faktor pendukung: makin berkembangnya teknologi informasi sehingga semakin mudah internet diakses, makin banyak masyarakat yang aktif dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, sedangkan faktor penghambatnya: masyarakat yang sudah berumur dengan pendidikan rendah belum bisa menggunakan peranti elektronik, belum ada interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, dan belum digunakannya website Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai e-service”	Penelitian ini diterapkan di tingkat kabupaten serta hanya meneliti seberapa efektivitas website digunakan